
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR BANTARGEBAH, BEKASI

Strategies of Final Disposal Site (TPA) Management of Bantargebah, Bekasi

Djatismiko Winahyu ¹, Sri Hartoyo ², dan Yusman Syaukat ³

¹ Staff Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. E-mail: subditkerjasamapum@gmail.com

² Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. E-mail: shty@indo.net.id

³ Staff Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. E-mail: ysyaukat@gmail.com

ABSTRACT

TPA Bantargebah is an asset owned by DKI Jakarta Provincial Government and the only final disposal site for all solid waste from Jakarta. The increase of solid waste volume buried in the site will have consequence of shorter use. The bad practice of sanitary landfill also makes the condition worse. The research is intended to know the existing condition of TPA Bantargebah and to determine the alternatives of management strategy of TPA Bantargebah that could be adopted by DKI Jakarta Provincial Government using qualitative approach with analytic descriptive design. The sample of the research is the stakeholder in solid waste sector namely government, expert and community. The data collection is through questionnaire, interview, observation and documentation. The technique of data analysis using SWOT analysis. Based on the result of analysis, can be conclude that optimizing the management of TPA Bantargebah could be achieved through four alternatives of strategy increasing infrastructures, involving investors in the construction and operation of TPA, promoting social participation and promoting the quality of human resources. The result of the research shows that priority of the choice is the development of investors in the construction and operation of TPA with a big government role in its management.

Keywords: Final Disposal Site, SWOT Analysis, Waste Management

ABSTRAK

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebah merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan satu-satunya TPA bagi seluruh sampah dari DKI Jakarta. Semakin meningkatnya volume sampah yang dibuang ke TPA tersebut akan memperpendek usia pemanfaatannya. Kondisi ini diperparah dengan belum diterapkannya SOP *Sanitary Landfill*. Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah TPA Bantargebah dan menentukan strategi pengelolaan TPA Bantargebah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Sampel penelitian ini adalah para pakar di bidang persampahan baik dari pihak pemerintah, pakar maupun masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan TPA Bantargebah dapat dicapai melalui empat alternatif strategi, yaitu: peningkatan infrastruktur, yang melibatkan investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA, mempromosikan partisipasi social, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pilihan adalah mengembangkan dari investor dalam pembangunan dan pengoperasian TPA dengan peran pemerintah yang besar dalam pengelolaannya.

Kata kunci: Tempat Pembuangan Akhir, Analisis SWOT, Pengelolaan Sampah



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, telah membawa perubahan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk bidang kerjasama daerah. Perubahan tersebut diharapkan menuju terciptanya sistem pengelolaan kerjasama daerah yang lebih baik dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Kondisi-kondisi menunjukkan adanya fakta saling membutuhkan antar bersangkutan untuk membentuk kerjasama yang akan menghasilkan suatu sinergi yang "saling menguntungkan". Oleh karena itu, melihat perkembangan pesatnya pertumbuhan Kota Jakarta dalam dua dasa warsa terakhir ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap daya dukung lingkungan, perilaku, dan pola kehidupan masyarakat juga ikut berubah hal ini mengakibatkan sikap terhadap kepedulian untuk mendukung kepentingan bersama semakin terkikis. Sementara disisi lain, adanya kebijakan *zero growth* yang ditetapkan dalam kebijaksanaan kepegawaian pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan kebersihan terutama untuk aspek non teknis antara mengenai kelembagaan dan organisasi pegawai operasional dilapangan.

Permasalahan yang melatar belakangi kajian pengelolaan persampahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang ini adalah bahwa usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan selama ini dalam penanganan sampah dan tugas pokok lainnya dipandang masih belum optimal terutama dalam operasional pengolahan sampah akhir. Oleh karena itu, dasar hukum sebagai pelaksanaan pengelolaan persampahan antar kedua

pemerintah daerah tersebut tertuang dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 1999 dan Nomor 168 Tahun 1999 tentang pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.

Dengan melihat pengelolaan persampahan yang ada di TPA Bantargebang saat ini diharapkan bisa menjadi konsep yang akan datang untuk diterapkan dalam pengelolaan sampah di Bantargebang.

Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi saat ini pengelolaan sampah di DKI Jakarta yang diproduksi setiap harinya 6.000 ton per hari dan sekitar 4.000 ton per hari dibuang ke TPA Bantargebang, Bekasi, melihat produksi sampah yang dihasilkan cukup besar maka harus diimbangi dengan pengelolaan yang optimal karena masalah persampahan sebagai akibat dari penambahan penduduk kota sehingga menuntut peningkatan pola pengelolaan sampah yang lebih baik, heterogenitas tingkat sosial budaya penduduk kota dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangani masalah sampah, keterbatasan dan kurangnya tersedianya sumberdaya manusia yang sesuai untuk menangani masalah sampah, pengembangan teknologi penanganan persampahan yang bergerak relatif lambat.

Peningkatan jumlah sampah baik dalam segi volume maupun jenisnya menuntut keseriusan dan perhatian lebih untuk pengelolaannya tidak hanya sekedar untuk upaya pengumpulan, transportasi dan pemusnahan semata. Disamping itu perubahan dan pergeseran perilaku dan pola konsumsi masyarakat perkotaan juga mewarnai perubahan signifikan jenis dan volume sampah, yang pada gilirannya menuntut perubahan manajemen dan fisik atas sampah.

Keberadaan TPA dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian terutama bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Disamping itu, TPA Bantargebang masih lebih diposisikan sebagai aset atau fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya berfungsi melayani kebutuhan masyarakat (*service center*) dalam hal pengolahan akhir sampah dan kurang memperhitungkan manfaat atau nilai tambah (*added value*) yang dapat dihasilkan dari sampah.

Berdasarkan kondisi saat ini penerapan teknologi yang digunakan yang awalnya menggunakan teknologi *sanitary landfill* yang benar ternyata dalam operasionalisasinya masih tetap menimbulkan masalah seperti gas yang dapat mencemarkan udara. Apalagi bila dalam operasionalnya *sanitary landfill* telah bergeser menjadi *open dumping*, membuang sampah tanpa mengolah, dapat berdampak negatif seperti air lindi yang akan menimbulkan bau tidak enak dan menjadi tempat berkembangnya bibit penyakit. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian adalah "Bagaimana rumusan strategi pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang di Kabupaten Bekasi?".

Tujuan Penelitian

Tujuan umum kajian ini adalah untuk merumuskan kebijakan strategi pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang di Kabupaten Bekasi. Untuk memenuhi tujuan umum tersebut, maka tujuan spesifik dari kajian ini adalah :

1. Mengevaluasi kinerja pengelolaan TPA Bantargebang.
2. Merumuskan strategi dan program yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPA Bantargebang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sampah

Berbagai aktivitas dilakukan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi barang dari sumberdaya alam disamping menghasilkan barang yang akan dikonsumsi manusia dihasilkan pula bahan buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Bahan buangan ini dikenal dengan istilah *waste* (limbah) yang dalam wujudnya berbentuk padat, cair dan gas (Saraswati, 2001).

Para ahli kesehatan lingkungan telah memberikan bahasan/pengertian tentang sampah, antara lain sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk di dalamnya). Pusat Pendidikan Nasional Kesehatan RI (1987) mendefinisikan sampah adalah benda yang tidak dipakai, tidak diinginkan dan dibuang, yang berasal dari suatu aktifitas dan bersifat padat (tidak termasuk buangan yang bersifat biologis).

Sementara Nurmandi (2006) mengatakan bahwa sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya. Ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

Manajemen Pengolahan Persampahan

Pengolahan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah yang dihasilkannya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan

sehat. Menurut Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (1989) untuk dapat mengelola sampah pemukiman atau kota yang sampahnya semakin banyak dan masalah yang kompleks, diperlukan suatu lembaga atau institusi yang dilengkapi dengan peraturan, pembiayaan/pendanaan, dan peralatan penunjang yang semuanya menjadikan suatu sistem, kesadaran masyarakat yang cukup tinggi, penanganan setempat, serta pengelolaan terpusat.

Adapun definisi manajemen untuk pengelolaan sampah di negara-negara maju sebagaimana dikemukakan oleh Dalzell et. al. (1984), yaitu sebagai disiplin yang berhubungan dengan pengendalian bagi penghasil, tempat penyimpanan, transfer dan transportasi, prosesing dan pembuangan sampah. Menurut Nurmandi (2006) di kota-kota di Indonesia, manajemen persampahan menggunakan dua sistem yaitu sistem formal atau konvensional dan sistem informal atau non konvensional.

Sumber dari sampah pada umumnya berhubungan erat dengan penggunaan tanah dan pembagian daerah untuk berbagai kegunaan. Menurut Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (1989) pada dasarnya sumber sampah dapat diklasifikasi dalam beberapa kategori, yaitu: (1) Pemukiman Penduduk, (2) Tempat-tempat umum dan tempat perdagangan, (3) Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah, (4) Industri berat ringan, dan (5) Pertanian. Sementara Murthado dan Said (1987) membedakan sampah ada dua cara pembagian yang digunakan, yakni berdasarkan istilah teknis dan kepada sumbernya.

Kegiatan pengangkutan merupakan kegiatan operasional yang dimulai dari sumber sampah atau Transfer Depo/TPS ketempat pengolahan/Tempat Pembuangan Akhir. Frekuensi pengangkutan ini dapat bervariasi. Menurut Gaur (1983) untuk daerah-daerah menengah ke atas frekuensinya lebih sering dibandingkan dengan daerah lainnya, misalnya dua kali sehari. Sedangkan untuk kawasan lainnya satu kali sehari tetapi hendaknya dipahami

apabila kurang dari satu kali sehari menjadi tidak baik karena sampah yang tinggal lebih dari satu hari dapat mengalami proses pembusukan, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

Menurut Taufiq (2002) kebutuhan biaya yang berfungsi untuk membiayai operasional persampahan kota di Indonesia yang dimulai dari penyapuan jalan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, pengolahan sampah dan pembuangan akhir, agar cukup memadai, minimal 5 sampai 10 persen dari APBD.

Menurut Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (1989) dalam teknis operasional pengolahan sampah, biaya untuk kegiatan pengumpulan sampah dapat mencapai lebih kurang 40 persen dari total biaya operasional. Oleh karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah dan kebersihan sementara terbatas kemampuan keuangan daerah perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi pelayanan persampahan kebersihan yang dengan sendirinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara khusus serta dapat memberikan kontribusi yang diharapkan cukup baik bagi kemampuan keuangan daerah secara umum.

Menurut Davey (1988), retribusi adalah pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan dan biasanya dimaksud untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan. Sementara menurut Wardhani (2004), retribusi adalah suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan. Sedangkan menurut Siregar (2004), retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan.

Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Sampah

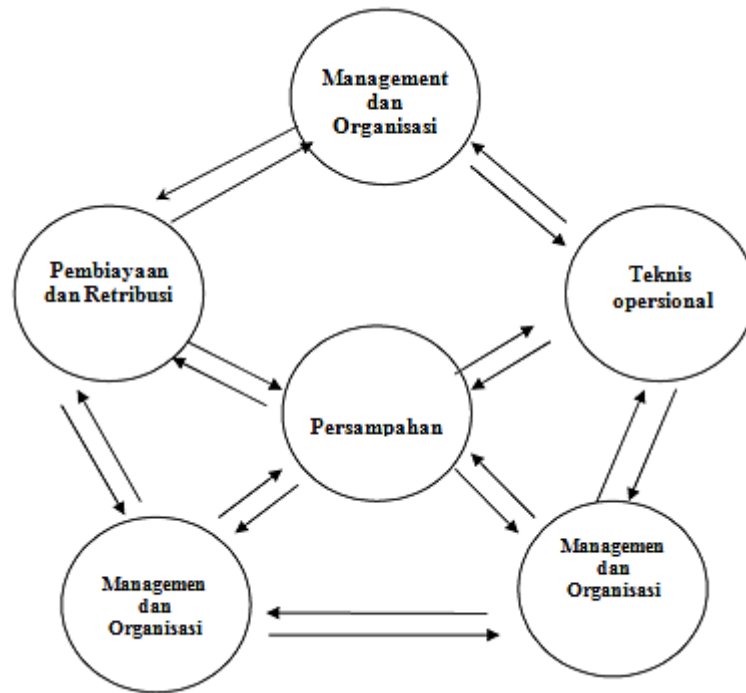
Adanya peran serta masyarakat yang baik akan memudahkan pelaksanaan operasional di lapangan dan bahkan dapat

menurunkan biaya pengelolaan. Dengan demikian maka diperlukan suatu program untuk meningkatkannya secara terpadu, teratur dan terus menerus serta dapat bekerja sama dengan organisasi yang terdapat dalam masyarakat.

Soma (2005), bahwa manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan juga mengusahakan sumberdaya alam lingkungannya demi hidupnya. Menurut Suriawiria (1996), dengan lingkungan yang baik dapat ditingkatkan mutu kehidupan, sehingga membuat setiap orang kerasan tinggal di dalam lingkungannya. Kebersihan dan keindahan adalah keadaan yang sesuai dengan tata lingkungan untuk memenuhi harapan dalam menghasilkan sebuah kota yang berkembang secara

dinamis dalam mewujudkan keseimbangan antara alam dan manusia.

Masyarakat diharapkan ikut serta, karena hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sesuai dengan pendapat Sidik *et.al.* (1985), bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dapat lebih terlaksana apabila pembangunan itu sendiri berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran serta masyarakat diharapkan dalam menyertai pemerintah dalam memberikan bantuan guna meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin kebersihan usaha pembangunan.



Gambar 1. Aspek Manajemen Persampahan
 Sumber: Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta (1989)

Kerangka Pemikiran

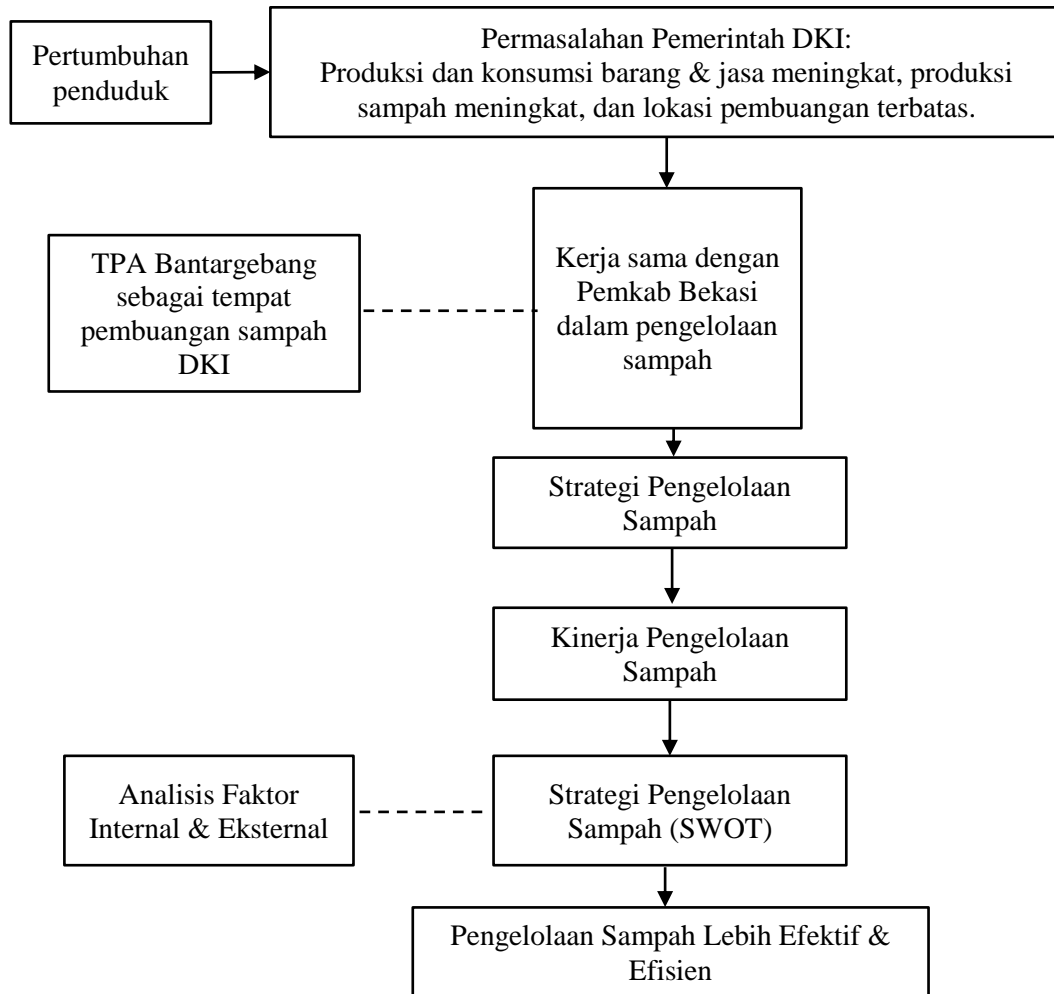
TPA Bantargebang yang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya tidak hanya memberikan manfaat (*benefit*) sebagai tempat pembuangan akhir sampah, akan tetapi juga memberikan nilai tambah (*added*

value) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemilik aset dan pihak-pihak lain (*stakeholders*) yang terlibat dalam pengelolaan TPA tersebut. Namun kenyataannya, TPA Bantargebang lebih banyak menimbulkan dampak negatif terutama terhadap lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara. Belum banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah di TPA Bantargebang

ini bila dibandingkan dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan aset TPA Bantargebang guna memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih besar lagi.

Untuk dapat menentukan strategi yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan analisis lingkungan strategis yang ada di sekitar baik secara

internal maupun eksternal (analisis SWOT). Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu dan rencana awal pendirian TPA Bantargebang, maka akan didapatkan beberapa skenario atau strategi yang dapat dipakai dalam pengelolaan aset TPA Bantargebang. Kerangka pemikiran pengelolaan TPA Bantargebang dapat digambarkan dalam Gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang ada di Bantargebang Bekasi Jawa Barat. TPA yang mempunyai luas lokasi 108 ha

ini mulai dioperasikan pada bulan Agustus 1989 dan direncanakan untuk menampung sampah dari belahan Timur Jakarta dengan menggunakan metode *sanitary landfill*. Penelitian lapangan dilakukan pada 2008-2009.

Jenis dan Sumber Data

Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil diskusi dilapangan yang biasa dilakukan peneliti. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, hasil survei lapangan dan penyebaran kuesioner terhadap beberapa orang yang dianggap pakar dalam masalah pengelolaan sampah dan TPA.

Data sekunder merupakan jenis data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Biro KAKDA DKI Jakarta dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, maupun yang bersumber dari berbagai literatur (referensi), laporan, tulisan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan topik atau permasalahan penelitian.

Tabel 1. Distribusi Responden Kajian

No	Kelompok	Jenis Responden	Jumlah
1.	Masyarakat	Desa Ciketing Udik	5 orang
		Desa Cikiwul	5 orang
		Desa Cikiwul Sumur Batu	5 orang
2.	Pemulung	Di Zone I, II, III	10 orang
3.	Pemerintah Daerah/pakar	Dinas Kebersihan DKI Jakarta	5 orang
		Biro KAKDA DKI	2 orang
		Dinas Kebersihan dan lingkungan Kota Bekasi	2 orang
		Kepala Unit TPA Bantargebang	2 orang

Metode Analisis

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dan QSPM

berdasarkan Rangkuti (2001). Tujuan kajian, jenis data yang diperlukan, sumber data dan metode analisis yang digunakan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Metode Analisis

Tujuan	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis
- Evaluasi kinerja pengelolaan sampah	- Unit TPA Bantargebang	Sekunder	Analisis Tabulasi
- Perumusan strategi pengelolaan TPA sampah bantergabang	- Faktor pengendali internal - Faktor pengendali eksternal	Primer	- Analisis SWOT - QSPM

Untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan TPA Bantargebang, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Penggunaan matriks SWOT dilakukan untuk memformulasikan atau mengembangkan berbagai pilihan strategi untuk pengelolaan TPA. Tahapan teknik

analisis data dalam penelitian ini dengan pengolahan

Identifikasi masalah dalam pengelolaan TPA Bantargebang, menggunakan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal terhadap TPA Bantargebang, dilakukan melalui pengamatan serta wawancara mendalam

dengan para pakar, kemudian diperkuat dengan mempelajari beberapa referensi yang berkaitan dengan pengelolaan TPA. Data diolah dengan menggunakan matrik SWOT dalam pengelolaan TPA, sehingga diperoleh empat skenario strategi pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, yaitu:

1. Skenario Strategi *Strength-Opportunity* (SO) adalah penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kekuatan) dengan faktor eksternal (peluang) dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi, antara lain peningkatan anggaran dan perbaikan teknologi, optimalkan komitmen DKI, optimalkan sarana transportasi, optimalkan bisnis daur ulang.
2. Skenario Strategi *Weakness-Opportunity* (WO) adalah penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang) dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, antara lain Tingkatkan sarana prasarana, penguatan kelembagaan.
3. Skenario Strategi *Strength-Threats* (ST) penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kekuatan) dengan faktor eksternal (ancaman) dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, antara lain optimalkan SDM, optimalkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan tata ruang.
4. Skenario Strategi *Weakness-Threats* (WT) adalah merupakan pencocokan atau kombinasi antara faktor internal (kelemahan) dengan faktor eksternal (ancaman) dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman antara lain memperlancar sarana pengangkutan sampah, Optimalkan sosialisasi untuk mengurangi konflik di sekitar TPA dan penguatan kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja Pengelolaan TPA Bantargebang, Bekasi

Ada beberapa indikator kinerja yang perlu mendapatkan evaluasi terkait dengan beberapa aspek antara lain:

Aspek Institusi / Kelembagaan TPA

a) Struktur organisasi dan tata laksana kerja

Struktur organisasi yang ada saat ini di unit TPA Bantargebang belum cukup dapat menangani operasional sehari-hari, namun apabila unit yang ada di TPA Bantargebang ingin lebih meningkatkan kualitas pelayanan, maka organisasi ini perlu ditinjau kembali terutama menyangkut tugas dan kewenangan koordinasi wilayah di tiap-tiap *zone* yang ada sebagai ujung tombak belum maksimal di lapangan. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Struktur Organisasi dan Tata laksana Unit Pengelola TPA Bantargebang, perlu ada kejelasan dan kewenangan koordinasi wilayah di tiap-tiap *zone*, dan penambahan unit-unit pada seksi-seksi teknis.

b) Bidang Sumberdaya Manusia

Berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, jumlah personil yang ada di lapangan haruslah cukup memadai sesuai dengan lingkup kerjanya. Kriteria personalia minimal harus cukup memadai untuk pelayanan setiap 100 penduduk dilayani dua orang petugas, dalam pelaksanaannya jumlah penduduk yang terlayani hanya mencapai 35 persen dari jumlah penduduk yang ada di DKI dan di Kabupaten Bekasi. Oleh

karena itu perlu adanya penambahan personil karena sampai saat ini hanya terlayani 35 persen sehingga masih kekurangan pelayanan hampir 65 persen dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah dalam penambahan personil untuk pelayanan di lapangan.

Aspek Teknis Bidang Persampahan

a) Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan yang diberikan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta maupun Pemerintah Kabupaten Bekasi apabila dilihat dari skala kepentingan sebagian sudah terlayani, seperti pada permukiman dengan kepadatan lebih dari 50 jiwa/ha. Namun untuk tingkat pelayanan berdasarkan perhitungan dan data yang ada terlihat bahwa tingkat pelayanan berdasarkan jumlah produksi sampah sehingga masih belum memadai baru mencapai sekitar 40 persen. Hal ini tentunya belum mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebesar 75-80 persen.

b) Teknis Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah pada saat ini masih belum dipilah-pilah antara sampah anorganik dan sampah organik sehingga masih dimanfaatkan oleh pemulung untuk diambil lagi dan diolah sendiri sehingga banyak tercecer yang menimbulkan bau yang tidak enak, oleh karena itu perlu adanya pemilahan yang dilakukan oleh petugas dari DKI Jakarta dalam hal ini unit yang ada di TPA Bantargebang. Oleh karena itu tingkat pelayanan berdasarkan produksi sampah yang dihasilkan masih mencapai 40 persen, sedangkan target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebesar 75-80 persen oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan dalam tingkat pelayanannya, adanya keterlibatan pemulung dalam pemilihan sampah anorganik maupun sampah organik dan diperlukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemulung dalam pengelolaan persampahan di TPA Bantargebang, Bekasi.

Aspek Pembiayaan

Pendanaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan TPA Bantargebang, terutama dari sudut pandang pengelola yang beranggapan bahwa makin banyak sampah yang masuk ke TPA maka akan semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk tahun 2007 Dinas Kebersihan menggunakan data sampah yang masuk ke TPA Bantargebang sebesar 5.497 ton per hari atau sekitar 79,5 persen dari total produksi sampah kota. Namun pembiayaan yang ada saat ini untuk pengelolaan sampah Bantargebang hanya kurang dari 10 persen dari APBD sehingga diperlukan keterlibatan dari pihak swasta dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Aspek Pengangkutan Sampah ke TPA

Pengangkutan sampah yang saat ini sebesar 1.114 kali per hari (Dinas Kebersihan, 2008). Keakuratan data ritasi akan menentukan berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transportasi (biaya BBM). Jauhnya lokasi TPA dengan lalu lintas yang cukup padat mengakibatkan pengangkutan sampah dari sumber atau lokasi-lokasi penampungan sementara menuju TPA menjadi tidak efisien sehingga tiap kendaraan hanya mampu mengangkut tidak lebih dari dua kali dalam sehari. Melihat kondisi kemampuan bongkar muatan sampah ini (1 *truck* membutuhkan waktu 4 menit). Bila saat ini hanya tiga zona yang dioperasikan (aktif), maka dalam satu jam hanya dapat membongkar 45 *truck*. Untuk membongkar sampah per hari yang mencapai 1.114 *truck/trip* dibutuhkan waktu sekitar 24 jam tanpa henti. Penumpukan kendaraan pada tiga lokasi pembuangan (zona aktif) berdampak pada panjang dan lamanya antrian kendaraan untuk dapat dilayani pembakaran sampahnya. Oleh karena itu

diperlukan penambahan truk untuk bongkar sampah di lokasi yang memakan waktu, dan perlu adanya penerapan manajemen aset dalam pengelolaan fasilitas publik yang dimiliki pemerintah daerah seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang.

Timbulan Sampah

Berdasarkan data dari dinas kebersihan DKI Jakarta pada Tahun 2009, jumlah timbulan sampah yang bersumber dari sektor permukiman, perkantoran, industri, sekolah, pasar dan rumah sakit sangat meningkat, kondisi ini tidak sebanding dengan sarana prasarana yang ada di DKI maupun di Kabupaten Bekasi untuk pengangkutan sampah di dua daerah tersebut. Untuk wilayah Jakarta sampah yang dapat terangkut sekitar 26.962 m³ atau setara dengan 97,50 persen sedangkan sisanya 692 m³ atau setara 2,50 persen tidak terangkut. Melihat kondisi tersebut Pemerintah Daerah harus menyediakan alternatif lahan tambahan selain TPA Bantargebang yang selama ini digunakan untuk pembuangan sampah di kedua pemerintah daerah dan perlu kerjasama dengan daerah lain seperti Kabupaten Tangerang yang selama ini telah ada perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan lahan dalam pengolahan sampah (TPST) untuk dapat ditindaklanjuti.

Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan responden di lapangan diperoleh beberapa faktor strategis yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Bantargebang Bekasi. Faktor strategis tersebut terdiri dari 1) faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, 2) faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kebersihan. Faktor ini merupakan hal-hal yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merupakan kekuatan (*strength*) yang bernilai positif bagi keberhasilan pengelolaan TPA Bantargebang. Sebaliknya, kurangnya atau ketiadaan hal-hal yang seharusnya ada menjadi kelemahan (*weakness*) yang bernilai negatif dan akan mengurangi keberhasilan pengelolaan TPA Bantargebang. Hasil evaluasi faktor internal dari responden diperoleh nilai bobot dan rating di masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan.

Faktor kekuatan adalah bagian dari faktor strategis internal. Dianggap sebagai kekuatan karena dapat mendukung terhadap pengelolaan sampah TPA Bantargebang di Kabupaten Bekasi, oleh karena itu faktor kekuatan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dari masukan beberapa responden didapat faktor kekuatan yang dimiliki Kabupaten Bekasi dalam pengelolaan sampah TPA Bantargebang adalah sebagai berikut:

a) Anggaran TPA Bantargebang

Anggaran TPA merupakan anggaran yang cukup besar untuk dialokasikan dari tahun ke tahun setiap tahunnya dianggarkan sebesar hampir satu milyar rupiah oleh DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan TPA bantargebang secara optimal sehingga keberadaan TPA dapat memberikan kontribusi yang positif dan berkelanjutan untuk masa depan TPA yang lebih baik.

b) Komitmen Pemprov DKI

Komitmen Pemprov DKI sangat diperlukan dalam menanganai pembuangan sampah di TPS-TPS yang ada di wilayah sekitar DKI Jakarta terutama menjaga dan memelihara stabilitas operasional ke Bantargebang termasuk masalah penganggaran TPA Bantargebang.

c) Sarana transportasi

Sarana transportasi merupakan perlengkapan pendukung untuk menunjang operasional TPA terutama mobilisasi untuk pengambilan maupun pembuangan dari seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta.

d) Sumberdaya manusia

Sumberdaya Manusia karena sumberdaya manusia tidak terlepas dari keseluruhan upaya peningkatan pengelolaan sampah baik teknis manajerial dan operasional dalam pengelolaan sampah.

Faktor kelemahan adalah bagian dari faktor strategis internal, faktor tersebut dianggap sebagai kelemahan karena akan menjadi kendala dalam pengelolaan TPA Sampah Akhir di Kabupaten Bekasi. Setelah dilakukan permintaan pendapat dari beberapa responden terdapat lima faktor kelemahan yang harus dimimalisir dalam upaya pengelolaan TPA Sampah Bantargebang, antara lain:

a) Prasarana

Prasarana adalah infrastruktur jalan untuk menunjang operasional ke tempat pembuangan Akhir TPA Bantargebang, pembuatan saluran irigasi dan penerangan jalan.

b) Kerja Sama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah yang merupakan sangat diperlukan karena keberadaan lahan TPA berada di lokasi Kabupaten Bekasi sehingga diperlukan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan DKI Jakarta dalam hal anggaran untuk operasioanalisasinya maupun pengelolaan TPA Bantargebang.

c) Kelembagaan

Kelembagaan yang merupakan unit-unit yang diperlukan terutama yang ada di lapangan TPA harus jelas kewenangannya dalam pengelolaan TPA sehingga dalam pembagian tugasnya di lapangan secara operasional lebih jelas.

d) Peraturan

Peraturan disini dirasa masih belum mampu mengakomodir berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan

pengelolaan sampah, sehingga perlu untuk direvisi untuk lebih bisa menjawab yang ada di lapangan.

e) Penggunaan Teknologi

Penggunaan Teknologi adalah dengan menerapkan teknologi *sanitary landfill* yang telah disepakati demi keberlangsungan TPA Bantargebang yang mutlak harus dilakukan dalam pengelolaan TPA Bantargebang ke depan yang baik dan mempunyai nilai jual yang tinggi.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada di luar pengendalian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Faktor ini akan berpengaruh langsung terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan pengelolaan TPA Bantargebang. Pengaruh ini dapat berkontribusi positif sehingga dapat memberikan peluang (*opportunity*) adanya akselerasi pelaksanaan kegiatan. Namun, terdapat pula faktor yang menjadi ancaman (*threat*) dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi faktor eksternal dari responden diperoleh nilai bobot dan *rating* dimasing-masing faktor pada peluang dan ancaman.

Faktor yang dianggap sebagai peluang adalah faktor yang bias dimanfaatkan dalam upaya pencapaian tujuan. Dari wawancara beberapa responden terdapat empat faktor yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengelolaan TPA Bantargebang di Kabupaten Bekasi. Peluang-peluang tersebut adalah:

a) Teknologi Pengolahan Sampah

Teknologi pengolahan sampah merupakan teknologi yang sangat diperlukan dan dapat diterapkan di TPA Bantargebang, baik itu alternatif pengomposan maupun sumber energi yang dihasilkan dan teknologi lain yang dapat menjadi nilai jual yang tinggi.

b) Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan



Jakarta sebagai pusat pemerintahan karena pusat pemerintahan berada di DKI Jakarta maka pemerintah DKI mempunyai daya tawar yang kuat untuk dapat mendukung dan menganggarkan dalam bidang persampahan.

c) **Bisnis Daur Ulang Cukup Prospektif**

Bisnis daur ulang cukup propektif dengan kapasitas produksi sampah yang sangat besar dan terus meningkat akan membuka peluang bisnis daur ulang yang cukup prospektif karena dapat memberikan penghasilan yang relatif mencukupi bagi kebutuhan pokok para pelakunya.

d) **Bantuan Luar Negeri untuk Masalah Lingkungan**

Bantuan luar negeri untuk masalah lingkungan diperlukan untuk pelestarian lingkungan di sekitar TPA maupun aspek teknis dalam pengelolaan persampahan.

Faktor ancaman adalah faktor yang dianggap bisa menghambat pengelolaan TPA Bantargebang di Kabupaten Bekasi. Dari wawancara terhadap beberapa responden terdapat lima faktor yang merupakan ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan upaya pengelolaan sampah pada TPA Bantargebang di Kabupaten Bekasi. Ancaman-ancaman tersebut adalah:

a) **Produksi Sampah yang Meningkat**

Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang baik maka akan menimbulkan permasalahan terutama produksi sampah meningkat sehingga perlu adanya solusi dalam penanganan dan pengelolaan sampah baik dari tingkat TPS-TPS yang ada sampai pengangkutan ke TPA.

b) **Peran serta Masyarakat Masih Rendah**
Peran serta masyarakat dimana kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam pembuangan sampahnya sebelumnya perlunya ada pemilahan.

c) **Konflik Masyarakat disekitar TPA**

Konflik masyarakat di sekitar TPA yang merupakan harus diwaspadai oleh pemangku pemerintah daerah.

d) **Perubahan Tata Ruang Kota**

Perubahan tata ruang yang merupakan adanya komitmen bersama pemerintah daerah dengan keterbatasan tanah untuk pembuangan sampah.

e) **Persaingan Tidak Sehat Investor**

Persaingan tidak sehat investor akan berdampak pada buruknya kualitas barang atau jasa/pekerjaan yang diberikan oleh investor yang pada akhirnya hanya mementingkan keuntungan (*profit oriented*).

Hasil Analisis Matriks SWOT dalam Perumusan Alternatif Strategi

Tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan (*matching stage*) dengan teknik matriks Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman (SWOT). Analisis SWOT ini didasarkan pada informasi yang diturunkan dari tahap input untuk mencocokkan peluang dan ancaman eksternal dengan kekuatan dan kelemahan internal. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan alternatif strategi yang layak secara efektif pada pengelolaan TPA Bantargebang Bekasi. Dari hasil analisis SWOT diperoleh 10 alternatif strategi dalam pengelolaan TPA Bantargebang Bekasi. Secara jelas matriks SWOT tersebut dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Matriks SWOT Strategi Pengelolaan TPA Bantargebang Bekasi

INTERNAL	KEKUATAN (S) 1. Anggaran TPA 2. Komitmen Pemprov DKI 3. Sarana transportasi 4. Sumberdaya manusia	KELEMAHAN (W) 1. Prasarana 2. Kerja sama antar daerah 3. Kelembagaan 4. Peraturan
EKSTERNAL		
PELUANG (O) 1. Teknologi pengolahan sampah 2. Jakarta sebagai pusat pemerintahan 3. Bisnis daur ulang cukup prospektif 4. Bantuan dari luar negeri untuk masalah lingkungan	STRATEGI S-O. 1. Peningkatan anggaran dan Perbaiki teknologi di bidang persampahan (S1, O1) 2. Optimalkan komitmen DKI sebagai pusat Ibukota Negara (S2, O2) 3. Optimalkan ketersediaan sarana transportasi (S3, O3) 4. Optimalkan bisnis daur ulang (S3,O3)	STRATEGI W-O 1. Tingkatkan sarana prasarana menuju TPA (W1, O3) 2. Penguatan kelembagaan (W3, O3)
ANCAMAN (T) 1. Produksi sampah yang meningkat 2. Peran serta masyarakat masih rendah 3. Konflik masyarakat di sekitar TPA 4. Perubahan tata ruang kota 5. Persaingan tidak sehat investor	STRATEGI S-T 1. Optimalkan SDM untuk sosialisasi peran serta masyarakat dalam bidang persampahan (S4,T2,T3,T5) 2. Optimalkan komitmen Pemprov untuk mewujudkan tata ruang yang konsisten (S2, T4)	STRATEGI W-T 1. Memperlancar sarana pengangkutan sampah (W1, T1) 2. Optimalkan untuk mengurangi konflik masyarakat disekitar TPA (W2, T3) 3. Penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan tata ruang kota yang konsisten (W4,T4)

Sumber: Hasil olahan, 2009

Strategi S-O

Strategi S-O merupakan penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kekuatan) dengan faktor eksternal (peluang) dengan cara menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:

1) Peningkatan anggaran dan perbaikan teknologi di bidang persampahan
Pemerintah DKI Jakarta mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengelolaan persampahan TPA Bantargebang dari tahun ke tahun terutama dalam perbaikan sistem teknologi yang sekarang ada sehingga keberadaan TPA secara optimal dapat dirasakan oleh Pemerintah Daerah maupun manfaatnya dapat dirasakan pula oleh masyarakat di sekitar wilayah empat desa.

2) Optimalkan komitmen DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara

Dalam meningkatkan citra Jakarta sebagai kota jasa dan kedudukannya sebagai ibukota negara yang merupakan pintu gerbang negara Indonesia, faktor kebersihan menjadi salah satu unsur yang harus dijaga dan mendapat prioritas penanganan. Dengan demikian, maka pemerintah harus menjaga dan meningkatkan komitmen untuk terus memelihara stabilitas operasional dan daya dukung dalam melakukan pengelolaan sampah.

3) Optimalkan ketersediaan sarana transportasi

Ketersediaan sarana transportasi yang dimiliki oleh DKI Jakarta adalah paling utama untuk mendukung dan menunjang dalam operasionalisasi dalam pengangkutan sampah sampai tempat pembuangan akhir ke TPA Bantargebang.

4) Optimalkan bisnis daur ulang

Dengan berbagai teknologi yang diterapkan di TPA Bantargebang dalam pengelolaan sampah dan didukung oleh SDM yang baik maupun dari segi *market* maka bisnis daur ulang seperti pengomposan, *waste to energy* (WTE), metanisasi atau teknologi lainnya akan memiliki nilai tambah atau nilai daya jual yang tinggi sehingga akan memberikan dan membuka lapangan kerja baru yang akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat terutama disekitar TPA.

Strategi S-T

Strategi S-T merupakan penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kekuatan) dengan faktor eksternal (ancaman) dengan cara menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dengan alternatif sebagai berikut:

1) Optimalkan SDM untuk sosialisasi peran serta masyarakat dalam bidang persampahan

Sumberdaya Manusia merupakan faktor terpenting dalam mensosialisasikan persampahan yang merupakan upaya peningkatan untuk yang lebih baik. Kemampuan manajerial dan operasionalisasi dari pelaku pengelolaan TPA menjadi syarat mutlak agar pengelolaan TPA menjadi semakin baik.

2) Optimalkan komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan tata ruang yang konsisten

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara yang merupakan pemegang kebijakan terutama dalam tata ruang kota yang mempunyai komitmen serta konsisten yang tinggi terhadap tata ruang kota terutama pada TPA Bantargebang dimana dengan keterbatasan lahan tanah khususnya di perkotaan harus diantisipasi untuk perubahan tata ruang sehingga tidak berdampak kepada kebutuhan tanah yang sangat terbatas.

Strategi W-T

Strategi W-T merupakan penggabungan atau kombinasi antara faktor internal (kelemahan) dengan faktor eksternal (ancaman) dengan cara meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, dengan alternatif strategi sebagai berikut :

1) Memperlancar sarana pengangkutan sampah

Semakin meningkatnya produksi sampah di wilayah DKI Jakarta maka sarana mobilisasi pengangkutan sampah sangat diperlukan untuk memperlancar dalam operasionalisasinya di lapangan sampai menuju pembuangan ke TPA Bantargebang.

2) Optimalkan sosialisasi untuk mengurangi konflik masyarakat disekitar TPA

Dengan keberadaan TPA Bantargebang saat ini masih menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi keberadaan TPA menjadi hal yang sangat penting di sisi lain adanya penolakan dari masyarakat oleh karena itu Pemerintah DKI Jakarta perlu mengoptimalkan sosialisasi secara periodik terhadap pentingnya TPA sehingga akan membuat masyarakat sadar bahwa keberadaan TPA sangat diperlukan bagi masyarakat.

3) Penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan tata ruang kota yang konsisten

Dalam pengaturan mengenai pengelolaan persampahan perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang kuat sehingga mengurangi adanya pelanggaran dalam pengelolaan sampah disamping itu dengan keterbatasan lahan untuk TPA diperlukan komitmen yang baik pemerintah DKI dalam penataan ruang kota khususnya tata ruang dalam TPA.

Strategi W-O

Strategi W-O merupakan penggabungan atau pencocokan antara faktor internal (kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang) dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dengan alternatif strategi sebagai berikut :

1) Tingkatkan sarana prasarana menuju TPA

Daya dukung sarana prasarana akan menjadi peluang dalam pengelolaan sampah yang akan menghasilkan keuntungan dalam hal bisnis serta *profit* yang di dalamnya untuk menunjang keberadaan TPA.

2) Penguatan kelembagaan

Dengan institusi yang ada baik unit maupun dinas kebersihan yang ada saat ini di DKI Jakarta perlu adanya suatu kelembagaan yang fokus menanganai sampah dalam bentuk suatu kelembagaan seperti BUMD atau Badan Usaha Bersama

dalam bidang persampahan, diharapkan dengan lembaga ini akan lebih profesional dalam penanganannya.

Tahap Pengambilan Keputusan (Decision Stage)

Tahap selanjutnya dari perumusan strategi adalah tahap pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis QSPM (*Quantitative Strategic Planning Matrix*). Analisis ini ditujukan untuk menentukan prioritas strategi pengelolaan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi.

Analisis QSPM dilakukan dengan cara memberikan nilai kemenarikan relatif (*Attractive Score = AS*) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan relatif (*Total Attractive Score = TAS*) yang tertinggi merupakan prioritas strategi. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan nilai TAS maka diperoleh matriks perencanaan strategik kuantitatif.

Tabel 4. Hasil Analisis QSPM Perumusan Prioritas Strategi Pengelolaan Sampah TPA Bantargebang Bekasi

No	Alternatif Strategi	TNDT	Ranking
1.	Peningkatan anggaran dan perbaikan sistem teknologi dibidang persampahan	7.220	I
2.	Optimalkan komitmen DKI sebagai Pusat Ibukota Negara	6.118	IX
3.	Optimalkan ketersediaan sarana transportasi	7.170	II
4.	Optimalkan SDM untuk sosialisasi peran serta masyarakat dalam bidang persampahan	6.202	VII
5.	Optimalkan komitmen pemprov DKI untuk mewujudkan tata ruang yang konsisten	6.227	VI
6.	Memperlancar sarana pengangkutan sampah	7.019	III
7.	Optimalkan sosialisasi untuk mengurangi konflik masyarakat di sekitar TPA	6.172	VIII
8.	Penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan tata ruang kota yang konsisten	6.535	V
9.	Tingkatkan sarana prasarana menuju TPA	6.004	X
10.	Optimalkan bisnis daur ulang	6.813	IV
11.	Penguatan kelembagaan	5.966	XI

Berdasarkan hasil analisis QSPM seperti disajikan pada Tabel 4, terlihat bahwa strategi yang memiliki QSPM tertinggi adalah strategi peningkatan anggaran dan perbaikan sistem teknologi di bidang persampahan yang memiliki nilai TAS terbesar yaitu 7.220, sedangkan strategi yang memiliki nilai TAS terendah adalah 6.004 adalah strategi bantuan anggaran luar negeri untuk membangun infrastruktur TPA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang yang merupakan satu-satunya TPA yang digunakan untuk membuang sampah dari seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum sepenuhnya menerapkan teknologi pengolahan sampah seperti yang telah ditetapkan dalam rencana awal pembangunannya, yaitu *sanitary landfill* dan bahkan cenderung bergeser menjadi *open dumping*, yang merupakan praktek pembuangan sampah tanpa mengolah.
2. Dari sebelas skenario rumusan strategi dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang implementasinya akan dilakukan dalam waktu jangka pendek dengan lima skala prioritas utama adalah : 1) peningkatan anggaran dan perbaikan sistem teknologi dibidang persampahan; 2) Optimalkan ketersediaan sarana transportasi; 3) memperlancar sarana pengangkutan sampah; 4) Optimalkan bisnis daur ulang; dan 5) penguatan penegakan hukum untuk mewujudkan tata ruang kota yang konsisten.

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lain guna mengkaji kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para *stakeholders* dalam pengelolaan sampah terutama di TPA Bantargebang, kemudian dicarikan alternatif solusinya dalam rangka mewujudkan suatu sistem pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan dengan menggunakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan menghasilkan sumber Energi Listrik sehingga akan lebih bermanfaat bagi penduduk di empat desa di sekitar TPA sehingga mempunyai daya jual yang tinggi.
3. Perlu dikaji alternatif lahan untuk TPA sebagai pengganti TPA Bantargebang, Bekasi.
4. Perlu dilakukan pengkajian terhadap manajemen pemulung dalam pengelolaan persampahan di TPA Bantargebang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. 1989. Perencanaan Detail Sanitary landfill Bantargebang – Bekasi. Dinas Kebersihan Pemda DKI Jakarta.
- Gaur, A.C. 1983. A. manual of rural composting Project Field Document No. 15 Food and Agriculture Organization of The United Nation
- Nurmandi, Achmad, 2006. Manajemen Perkotaan, Yogyakarta, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- Rangkuti, Freddy, 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Saraswati, SP. 2001. Pengelolaan Sampah. Laboratorium Teknik Penyehatan & Lingkungan.
- Sidik, M.A. D. Herumartono dan H. Sutanto, 1985. Teknologi Pemusnahan Sampah dengan Incenerator dan Landfill, Jakarta, BPPT.
- Siregar, Doli D, 2004. Manajemen Aset : Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Soma, Soekamana, 2005. Peran Swasta dalam Pengelolaan Sampah Kota dalam Partisipasi Multi Stakeholders dalam Pembangunan Perkotaan, Jakarta, Seminar Nasional ASPI 2005 & Real Estate Forum.
- Suriawiria, U, 1996. Mikrobiologi Air dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis, Bandung, Penerbit Alumni.
- Taufiq A, M. 2002. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan Lingkungan. Development Urban Solid Waste Management Workshop in Indonesia. Jakarta, 13-14 Mei 2002.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wardhani, Citra 2004. Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Pemilahan Sampah Rumah Tangga, Tesis, Jakarta, PPS-PSIL UI.

